

---

## **Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (Aak) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin**

### ***Management of Village Budget Allocation (AAK) for Community Empowerment in Makarti Jaya Village, Makarti Jaya District, Banyuasin Regency***

**Karwanto<sup>1)</sup>, Andries Lionardo<sup>2)</sup> & Lies Nur Intan<sup>1)</sup>\***

1)Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

2) Universitas Sriwijaya, Indonesia

\*Corresponding Email: [liesnurintan2020@gmail.com](mailto:liesnurintan2020@gmail.com)

---

#### **Abstrak**

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengelolaan alokasi anggaran kelurahan (AAK) untuk pemberdayaa masyarakat serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi anggaran kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen seperti rencana kerja, laporan musrembang, dan catatan anggaran dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, pengelolaan alokasi anggaran di Kelurahan Makarti Jaya untuk pemberdayaan masyarakat masih belum optimal. Meskipun ada kemajuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran, penerapan pelatihan, dan kurangnya evaluasi sistematis. Keterlibatan masyarakat penting untuk keberhasilan program, namun keterbatasan anggaran dan dukungan pasca-pelatihan menghambat hasilnya. Pengawasan yang minim juga mengurangi transparansi. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan

#### **Abstract**

*This article or writing aims to describe the management of sub-district budget allocations (AAK) for community empowerment as well as community involvement in managing sub-district budget allocations (AAK) for community empowerment in Makarti Jaya Village, Makarti Jaya District, Banyuasin Regency. Data was collected through in-depth interviews and analysis of documents such as work plans, musrembang reports, and budget records and analyzed qualitatively. From the research results, the management of budget allocations in Makarti Jaya Subdistrict for community empowerment is still not optimal. Despite progress in planning, organizing, implementing, and monitoring, there are challenges such as budget constraints, implementation of training, and lack of systematic evaluation. Community engagement is critical to program success, but budget constraints and post-training support hamper results. Minimal oversight also reduces transparency. To increase effectiveness, there needs to be improvements in planning, implementation and supervision, as well as increased community support and participation.*

**Keywords:** Village Budget Allocation Management

**How to Cite:** Karwanto, Lionardo. A, & Intan. L. N. (2024). Pengelolaan Alokasi Anggaran untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makarti Jaya, Banyuasin. *Journal of Law & Policy Review*. 2 (1): 131-138

---



## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat (Kriswibowo et al., 2021). Di Kelurahan Makarti Jaya, pemberdayaan masyarakat menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan manajemen anggaran. Program-program pemberdayaan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat, tetapi sering kali mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Manajemen anggaran yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa program-program tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Claudia et al., 2022; Siregar et al., 2022).

Di Kelurahan Makarti Jaya, berbagai pelatihan telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan. Misalnya, pelatihan tata busana untuk wanita dan berbagai pembinaan kelembagaan telah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat. Namun, pelaksanaan program ini tidak selalu berjalan mulus. Salah satu masalah utama yang muncul adalah kurangnya minat masyarakat untuk menerapkan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dan membuka usaha yang dihasilkan dari pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan diberikan, hasil yang diharapkan tidak selalu terwujud. Ketidakefektifan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini sering kali disebabkan oleh masalah dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan program (Sinaga et al., 2022).

Masalah utama dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Makarti Jaya berkisar pada dua aspek utama yaitu, keterbatasan minat masyarakat dan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Keterbatasan minat masyarakat untuk melanjutkan pelatihan dan membuka usaha merupakan salah satu kendala yang signifikan. Meskipun berbagai pelatihan telah dilaksanakan, masyarakat masih kurang termotivasi untuk memanfaatkan keterampilan baru yang diperoleh. Kurangnya motivasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya dukungan sosial, rendahnya kepercayaan diri, dan kurangnya akses ke sumber daya yang diperlukan untuk memulai usaha (Azhima et al., 2022; Harahap et al., 2022).

Di samping itu, keterbatasan dana dari pemerintah kabupaten juga menjadi masalah yang tidak kalah penting (Purnawan et al., 2022). Dana yang disalurkan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati dalam musyawarah rencana pembangunan (musrebang). Musrebang adalah forum yang melibatkan masyarakat, RT, RW, karang taruna, dan tokoh masyarakat untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan (Hazzah & Ritonga, 2021; Setiawan et al., 2022). Meskipun hasil musrebang menunjukkan kebutuhan dan prioritas yang jelas, realisasi anggaran yang diterima sering kali tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan program secara penuh atau mengalokasikan dana secara efektif sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan (B. S. Nasution et al., 2023).

Ketidakefektifan untuk mengelola anggaran dengan baik juga berdampak pada pelaksanaan program pemberdayaan (Jamaluddin et al., 2019; Lalaun & Siahaya, 2015). Program yang telah direncanakan dengan baik sering kali tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena dana yang tersedia tidak mencukupi atau tidak dikelola dengan baik (Salman et al., 2018). Akibatnya, prioritas program harus diputuskan berdasarkan skala prioritas yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat (M. J. Halawa et al., 2023). Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan alokasi anggaran untuk memastikan bahwa dana digunakan secara optimal dan program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Data mengenai pelatihan dan anggaran sangat relevan dalam konteks pengelolaan alokasi anggaran dan pemberdayaan masyarakat (Sinaga et al., 2022). Pelatihan yang telah dilaksanakan memberikan gambaran tentang seberapa banyak keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh masyarakat (I. R. Nasution & Sartini, 2020). Namun, jika anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi atau tidak digunakan dengan efektif, hasil dari pelatihan tersebut mungkin tidak

dapat terealisasi secara optimal. Misalnya, pelatihan tata busana mungkin memerlukan bahan dan peralatan tambahan untuk memastikan bahwa peserta dapat mempraktikkan keterampilan yang telah dipelajari (I. R. Nasution & Sartini, 2020; Tanjung & Munte, 2020). Jika anggaran tidak mencakup biaya tersebut, hasil pelatihan mungkin tidak dapat diterapkan secara efektif (Yudhartha & Winaya, 2018).

Selain itu, pengelolaan anggaran yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang telah diidentifikasi dalam musrembang. Dana yang disalurkan harus mencerminkan prioritas dan kebutuhan yang telah disepakati bersama (Hakim & Pakam, 2014; B. S. Nasution et al., 2023). Jika anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, program-program pemberdayaan mungkin tidak dapat dilaksanakan secara penuh atau tidak dapat mencapai sasaran yang diinginkan (D. K. Halawa & Batubara, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif (Husnifal et al., 2023; Yudhartha & Winaya, 2018).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Makarti Jaya, diperlukan pengelolaan anggaran yang baik dan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi anggaran dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi pengelolaan alokasi anggaran Kelurahan (AAK) dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Makarti Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin. Metode ini fokus pada deskripsi mendalam menggunakan data berupa kata-kata dan gambar, bukan angka statistik.

Subjek penelitian melibatkan 8 informan yang relevan, termasuk kepala kelurahan, staf administrasi, dan anggota masyarakat terlibat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen seperti rencana kerja, laporan musrembang, dan catatan anggaran. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, memilih informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka.

Variabel yang diukur meliputi perencanaan, alokasi, dan penggunaan anggaran serta dampaknya pada pelaksanaan program pemberdayaan. Analisis data mengikuti prosedur Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini tidak menggunakan model statistik kuantitatif, melainkan pendekatan kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan anggaran dan dampaknya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makarti Jaya**

Pengelolaan alokasi anggaran di Kelurahan Makarti Jaya merupakan elemen vital dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga. Proses pengelolaan ini mencakup beberapa tahapan manajerial yang saling berhubungan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan adalah tahap awal yang sangat fundamental dalam pengelolaan anggaran. Tahap ini mencakup penetapan keputusan dan pedoman untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan melibatkan penentuan berbagai keputusan yang terkait dengan keinginan dan pedoman pelaksanaan guna mencapai tujuan (Nugraha & Sulastri, 2018). Di Kelurahan Makarti Jaya, perencanaan dilakukan oleh Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPKM), yang memulai proses ini dengan penyusunan rencana kerja. Rencana ini tidak hanya mengacu pada program-program yang telah berhasil di tahun-tahun sebelumnya tetapi juga mempertimbangkan usulan dari masyarakat.



Proses perencanaan di Kelurahan Makarti Jaya dapat dikatakan telah dilakukan dengan cukup baik. Kasi PPKM berusaha keras untuk mengintegrasikan usulan masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah formal maupun pengajuan langsung. Walaupun sebagian besar usulan berfokus pada pembangunan fisik, ada juga upaya untuk memasukkan kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan. Namun, tantangan muncul dalam penerapan hasil perencanaan secara berkelanjutan. Program-program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sering kali tidak diimplementasikan dengan efektif, dan keterampilan yang diperoleh sering kali tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan banyak program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sesuai rencana.

Pengorganisasian adalah tahap berikutnya yang melibatkan penetapan, pengelompokan, dan penyatuan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian mencakup penyediaan alat yang diperlukan, penetapan wewenang, dan delegasi tanggung jawab kepada individu atau kelompok yang akan melaksanakan aktivitas (Dauwole et al., 2017). Di Kelurahan Makarti Jaya, pengorganisasian telah dilakukan dengan cukup baik melalui pembagian tanggung jawab yang jelas kepada berbagai lembaga yang ada.

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan alokasi anggaran di Kelurahan Makarti Jaya termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, dan Karang Taruna. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi saling mendukung dalam upaya pemberdayaan masyarakat. LPM berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, PKK menangani kegiatan pemberdayaan berbasis keluarga, sedangkan Karang Taruna mengelola kegiatan untuk pemuda. Pembagian tugas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Namun, meskipun struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab sudah jelas, tantangan tetap ada dalam hal efektivitas koordinasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan non-fisik. Masih ada ruang untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam program-program yang dirancang.

Pelaksanaan atau *actuating* adalah tahap di mana semua rencana dan pengorganisasian diterjemahkan ke dalam aksi konkret. *Actuating* melibatkan penggerakan anggota organisasi untuk bekerja sama dengan semangat dan komitmen sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian (Megawati et al., 2023). Proses ini mencakup dua elemen penting: *directing* (pengarahan) dan *coordinating* (koordinasi). Di Kelurahan Makarti Jaya, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih menghadapi beberapa masalah utama.

Salah satu tantangan utama adalah masalah partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat permintaan tinggi untuk pelatihan keterampilan, sering kali setelah program pelatihan dilaksanakan, masyarakat tidak menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelatihan yang diberikan dan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, terdapat masalah dalam distribusi dukungan, seperti dana dan produk, yang tidak sepenuhnya dapat disalurkan kepada masyarakat. Keterbatasan dana dan prioritas anggaran sering kali menghambat pelaksanaan program-program seperti pembuatan jembatan dan jalan tembus yang sangat dibutuhkan.

Temuan lain yang mencuat adalah keterbatasan dana yang cair. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa keterbatasan dana menjadi faktor utama yang menghambat realisasi rencana kerja. Dana yang tersedia tidak selalu sesuai dengan permohonan anggaran yang diajukan, mengakibatkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Meskipun demikian, beberapa program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh AAK, seperti kegiatan LPM, Karang Taruna, dan Kelompok Wanita Tani (KWT), masih berjalan dengan baik, menunjukkan adanya beberapa aspek positif dalam pelaksanaan.

Pengawasan adalah proses memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. *Controlling* mencakup pemantauan, pelaporan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa rencana diimplementasikan dengan benar. Di Kelurahan Makarti Jaya, pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung oleh pihak kelurahan, kecamatan, dan

instansi terkait. Pelaporan kegiatan, seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari program pemberdayaan masyarakat, disusun dengan baik oleh Kasi PPKM.

Namun, meskipun pengawasan umumnya berjalan dengan baik, terdapat kekurangan dalam hal evaluasi. Evaluasi yang seharusnya dilakukan setelah kegiatan selesai tidak selalu terlaksana. Evaluasi adalah aspek penting untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan di masa mendatang. Ketiadaan evaluasi yang sistematis menghambat kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan melaksanakan perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara rutin untuk mendukung perbaikan dan peningkatan program pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan alokasi anggaran di Kelurahan Makarti Jaya menunjukkan kemajuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan, terutama terkait dengan keberlanjutan program, efektivitas pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan melakukan perbaikan di area ini, diharapkan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Makarti Jaya dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah perbaikan yang diperlukan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan dukungan pasca-pelatihan, dan pelaksanaan evaluasi yang sistematis.

### **Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makarti Jaya**

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi anggaran kelurahan merupakan elemen krusial yang dapat menentukan efektivitas dan keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat. Di Kelurahan Makarti Jaya, proses pengelolaan alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Keterlibatan ini merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan adalah tahapan awal dalam pengelolaan anggaran yang sangat penting karena menentukan arah dan tujuan dari penggunaan anggaran. Di Kelurahan Makarti Jaya, proses perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melibatkan masyarakat secara langsung. Menurut hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, perencanaan kegiatan tidak hanya didasarkan pada program yang telah ada dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan usulan-usulan dari masyarakat.

Usulan masyarakat disampaikan melalui berbagai saluran, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Misalnya, musyawarah desa yang dilakukan secara rutin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan usulan secara langsung kepada pihak kelurahan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengemukakan kebutuhan dan prioritas yang mereka anggap penting.

Namun, meskipun proses perencanaan ini sudah melibatkan masyarakat, masih terdapat tantangan dalam mengakomodasi semua usulan yang masuk. Banyak usulan yang diajukan berfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur, sementara kebutuhan non-fisik seperti pelatihan keterampilan juga penting. Keterbatasan anggaran sering kali mengakibatkan beberapa usulan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Oleh karena itu, pihak kelurahan perlu melakukan prioritas usulan yang lebih baik agar anggaran dapat digunakan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan adalah tahap di mana rencana yang telah disusun dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di Kelurahan Makarti Jaya, masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan. Contohnya, masyarakat mengikuti program pelatihan keterampilan, gotong royong, dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang diadakan oleh kelurahan.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program ini mencerminkan adanya minat dan kesadaran mereka terhadap pentingnya pemberdayaan. Namun, tantangan muncul ketika masyarakat tidak menerapkan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan usaha mereka. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan berkelanjutan setelah pelatihan, seperti bantuan modal atau akses pasar, yang sangat penting untuk penerapan keterampilan.

Pihak kelurahan perlu mempertimbangkan untuk memberikan dukungan tambahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dapat diterapkan dengan baik. Misalnya, menyediakan modal usaha atau bimbingan dalam penerapan keterampilan dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan keterampilan yang telah mereka pelajari.

Pengawasan adalah tahap penting dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Di Kelurahan Makarti Jaya, pengawasan umumnya dilakukan oleh pihak-pihak internal seperti lurah, kecamatan, dan dinas terkait. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan relatif minim.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan masih terbatas. Masyarakat biasanya tidak dilibatkan dalam pemantauan atau evaluasi kegiatan setelah pelaksanaan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu dipertimbangkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses ini. Misalnya, melibatkan masyarakat dalam komite pengawasan atau forum evaluasi dapat membantu memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai harapan dan anggaran digunakan secara efisien. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil program, serta memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan di masa depan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi anggaran di Kelurahan Makarti Jaya menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan dana sering kali menghambat pelaksanaan usulan dan program yang dianggap penting oleh masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pihak kelurahan perlu melakukan perencanaan dan prioritas yang lebih baik agar alokasi anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selain itu, kurangnya dukungan berkelanjutan setelah pelatihan keterampilan menjadi masalah. Masyarakat mungkin tidak dapat menerapkan keterampilan yang diperoleh tanpa adanya dukungan tambahan seperti modal atau akses pasar. Oleh karena itu, penting bagi pihak kelurahan untuk mempertimbangkan penyediaan dukungan tambahan agar hasil pelatihan dapat diterapkan secara efektif.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga perlu diperkuat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan program dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi anggaran di Kelurahan Makarti Jaya telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Masyarakat terlibat dalam menyampaikan usulan, mengikuti pelatihan, dan berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, perlu dilakukan perbaikan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mengatasi tantangan yang ada, diharapkan pengelolaan anggaran dapat lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di Kelurahan Makarti Jaya. Keterlibatan yang lebih aktif dari masyarakat dalam semua tahapan pengelolaan anggaran akan



membantu menciptakan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan alokasi anggaran kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat belum optimal. Meskipun begitu, pengelolaan alokasi anggaran di Kelurahan Makarti Jaya memainkan peran krusial dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup warga. Proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan namun masih menghadapi berbagai tantangan. Perencanaan yang melibatkan usulan masyarakat sudah baik, namun kendala seperti keterbatasan anggaran dan penerapan hasil pelatihan perlu diatasi. Pengorganisasian telah dilakukan dengan baik melalui pembagian tugas yang jelas antara lembaga, tetapi perlu ditingkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan program menghadapi masalah partisipasi dan distribusi dukungan yang tidak optimal. Pengawasan, meskipun baik dalam hal pemantauan, masih kurang dalam evaluasi sistematis.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi anggaran di Kelurahan Makarti Jaya merupakan kunci keberhasilan program pemberdayaan. Masyarakat berkontribusi dalam perencanaan dengan memberikan usulan dan mengikuti program, namun keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan setelah pelatihan menghambat hasil. Pengawasan yang minim oleh masyarakat juga mengurangi transparansi. Perbaikan diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, perlu dilakukan perbaikan dalam hal keberlanjutan program, efektivitas pelaksanaan, dan evaluasi. Perbaikan ini diharapkan dapat memperbesar dampak pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di Kelurahan Makarti Jaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhima, F., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2022). Analisis Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 56–68. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1184>
- Claudia, L., Sinaga, P. G., & Pakpahan, E. S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Perawat di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 396–402. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1231>
- Dauwole, E., Kaawoan, J., & Sendow, Y. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. *PERSPEKTIF*, 2(2), 1–11.
- Hakim, A., & Pakam. (2014). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tandam Hulu Ii Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 2(1), 1–20. [https://www.google.com/search?safe=strict&ei=\\_P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+-%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi%2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pacarkeling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=_P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+-%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi%2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pacarkeling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem)
- Halawa, D. K., & Batubara, B. M. (2022). Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat Effectiveness Performance Of Employees In The Field Of Social Development An. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(2), 138–144. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1409>
- Halawa, M. J., Ramadhan, M. C., & Zulyadi, R. (2023). Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3089–3101. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1739>
- Harahap, C. rizkia, Lubis, S. A., & Siregar, N. S. S. (2022). Hubungan Penyesuaian Diri dan Pola Asuh Demokratis dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1853–1859. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.960>
- Hazzah, S., & Ritonga, N. (2021). *E-Effectiveness Musrembang 's in the Development Planning Process in Medan 's Denai District*. 1(1), 185–196. <https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5614>
- Husnifal, H., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). Kinerja Birokrasi Dalam Pemberian Reward dan Punishment Untuk Peningkatan Produktifitas Kerja Dan Pengembangan Karir Pegawai Pada Sekretariat DPRK



- Langsa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2546–2656. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1661>
- Jamaluddin, Y., Fitriani, F., Safrida, S., & Warjio, W. (2019). Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2231>
- Kriswibowo, A., Sintawati, B., Pesica Kristianto, C. I., & Hidayati, T. N. (2021). Penanggulangan Sampah Masker Medis Sekali Pakai dengan Pendekatan “Village Health Volunteers” di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 982–989. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.788>
- Lalaun, A., & Siahaya, A. (2015). Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Administrasi Publik*, 5(2), 73–86.
- Megawati, Suwardi Lubis, & Lusiana Andriani Lubis. (2023). Manajemen Komunikasi Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dalam Kegiatan Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. *Perspektif*, 12(1), 331–343. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8573>
- Nasution, B. S., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3112–3118. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1769>
- Nasution, I. R., & Sartini, S. (2020). Pelatihan Akuntansi dan Pelatihan Penggunaan Bahan Pengawet kepada Pengusaha Home Industri Roti Kacang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 573–577. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.117>
- Nugraha, D. S., & Sulastri, L. (2018). Faktor Kompetensi Perencana, Data dan Anggaran pada Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal )*, 8(2), 172. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1904>
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Salman, I., Warjio, W., & Isnaini, I. (2018). Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almarar Desa Kelambir Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1576>
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *Perspektif*, 11(2), 718–734. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175>
- Sinaga, A. R. L., Sihombing, M., & Humaizi, H. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes ) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kodon-Kodon Kecamatan Merek Kabupaten Karo. *Perspektif*, 11(3), 1209–1218. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6429>
- Siregar, T. P., Jamil, B., & Mustafa, W. (2022). Training Effectiveness in Improving Policy-Preveloping Capabilities for Regional Financial and Assets Management Apparatus. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 37–45. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1182>
- Tanjung, D. A., & Munte, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Bata Ringan Kepada Home Industri Batu Bata Konvensional Guna Mendukung Program Pemerintah 1 Juta Rumah Bersubsidi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 578–582. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.116>
- Yudhartha, P. D., & Winaya, I. K. (2018). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1470>